

Ekonomis: Journal of Economics and Business

Volume 09, Issue 02, September 2025, p1126-1135

Webite: https://ekonomis.unbari.ac.id, E-Mail: ekonomis.unbari@gmail.com
ISSN 2597-8829 (Online), DOI: 10.33087/ekonomis.v9i2.2687

Article history:
Received: 08 August 2025
Revised: 03 September 2025
Accepted: 08 September 2025
Available online: 11 September 2025

Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023)

Rahmawati, Raden Budi Hendaris
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Achmad Yani
Corresponding Author: rahmawati_21p070@ak.unjani.ac.id, budi.hendaris@lecture.unjani.ac.id

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah menganalisis seberepa pengaruh efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan kualitas pengelolaan belanja daerah terhadap tingkat kemandirian keuangan pemerintahan daerah. Penelitian yang dilakukan menggunakan data dari berbagai sumber sebanyak 27 pemerintahan yang berada di daerah Jawa Barat, baik kabupaten ataupun kota dengan rentang waktu 2019-2023. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa secara simultan tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Pengelolaan Belanja Daerah terhadap terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Namun, jika secara parsial hanya variabel Efektifitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.

Kata kunci: efektivitas pendapatan asli daerah, pengelolaan belanja daerah, tingkat kemandirian keuangan daerah.

ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze the influence of the effectiveness of Regional Original Revenue and the quality of regional expenditure management on the level of financial independence of regional governments. The study used data from various sources from 27 governments in West Java, both districts and cities, for the period 2019-2023. This study used multiple linear regression analysis. The results of this study revealed that simultaneously there was no significant influence between the variables of the effectiveness of Regional Original Revenue and Regional Expenditure Management on the Level of Regional Financial Independence. However, partially, only the variable of the Effectiveness of Regional Original Revenue had a positive and significant effect on the Level of Regional Financial Independence in Regency and City Governments in West Java Province in 2019-2023.

Keywords**:** *effectiveness of regional original revenue, regional expenditure management, level of regional financial independence.*

PENDAHULUAN

Era reformasi memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengadakan aturan ataupun otonomi pada daerah yang diwenangi. Wewenang tersebut memberikan sebuah kebebasan bagi setiap daerah dalam mengelola dan mengatur urusan kepemerintahannya sendiri. Peraturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadikan acuan aturan untuk mengatur hal tersebut secara formal tentang pemerintah daerah, dengan menyatakan bahwa setiap daerah yang berada di wilayah Negara Republik Indonesia memiliki hak otonomi yang bebas dan luas. Kebijakan tersebut memiliki sebuah tujuan agar mengurangi dominasi serta intervensi langsung dari pemerintah pusat, sehingga tercipta sistem pemerintahan yang lebih desentralistik dan responsif terhadap kebutuhan lokal (Ramadhan et al, 2022).

Disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi tonggak awal penerapan kebijakan otonomi daerah di Indonesia. Konsep otonomi daerah merujuk pada hak, kewenangan, dan tanggung jawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam mengatur serta mengelola urusan pemerintahan dan kepentingan publik di wilayahnya masing-masing, yang dilaksanakan berdasarkan aspirasi masyarakat lokal dan dalam koridor ketentuan hukum yang berlaku (Marnas et al, 2016).

Sejak penerapan kebijakan desentralisasi, tingkat kemandirian fiskal daerah dipandang sebagai salah satu indikator kunci dalam mengevaluasi efektivitas pelaksanaan otonomi daerah. Pentingnya aspek ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta diperjelas lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menekankan perlunya penguatan kapasitas fiskal daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang responsif dan akuntabel (Widowati et al., 2024). Regulasi-regulasi tersebut berperan sebagai instrumen pendorong bagi pemerintah daerah untuk secara proaktif menggali dan mengelola potensi fiskal lokal secara mandiri. Tujuan utamanya adalah menciptakan kapasitas pendanaan yang memadai guna memenuhi kebutuhan pembangunan daerah serta penyediaan layanan publik secara lebih efisien dan responsif. Pendekatan ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap mekanisme birokrasi pemerintah pusat yang sering kali bersifat sentralistik dan kurang adaptif terhadap dinamika local (Hendaris & Sastradipraja, 2024).

Salah satu tujuan utama diterapkannya kebijakan otonomi daerah di Indonesia adalah untuk mendorong kemandirian pemerintah daerah dalam mengelola urusan pemerintahan secara optimal. Dalam konteks ini, isu mengenai kemandirian keuangan daerah menjadi semakin signifikan untuk dikaji. Tingkat kemandirian fiskal suatu daerah umumnya diukur melalui kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah. Semakin tinggi proporsi PAD dibandingkan dengan dana transfer dari pemerintah pusat, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian fiskal daerah tersebut (Tjahjono, & Oktavianti, 2016).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber penerimaan yang secara sah dikelola langsung oleh pemerintah daerah sebagai instrumen utama dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Tingginya kontribusi PAD mencerminkan efektivitas dan keberhasilan daerah dalam menggali potensi ekonominya, serta menjadi indikator kemampuan fiskal dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri tanpa ketergantungan berlebih pada dana transfer dari pemerintah pusat (Nur Shafira Anynda, 2020). Sejalan dengan tujuan otonomi fiskal, setiap pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan potensi lokal guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai langkah menuju kemandirian fiskal. Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah umumnya diukur melalui rasio antara PAD terhadap total dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat dan provinsi. Rasio ini menggambarkan sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kebutuhan pembangunannya secara mandiri, tanpa ketergantungan dominan pada sumber pembiayaan eksternal (Hakiki et al, 2023).

Tabel 1
Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023

Kabupaten / Kota	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Bandung	25,65%	28,51%	28,23%	26,65%	25,79%
Kab. Bekasi	82,52%	83,40%	80,90%	75,56%	76,90%
Kab. Bogor	70,30%	68,10%	79,54%	70,73%	70,87%
Kab. Ciamis	10,28%	11,34%	12,06%	12,79%	10,93%
Kab. Cianjur	23,64%	19,48%	26,75%	19,22%	21,16%
Kab. Cirebon	21,55%	21,95%	23,38%	25,92%	23,36%
Kab. Garut	12,13%	12,83%	14,82%	11,91%	12,69%
Kab. Indramayu	19,12%	23,85%	20,28%	20,79%	21,89%
Kab. Karawang	44,39%	46,78%	54,52%	51,02%	51,45%
Kab. Kuningan	17,31%	12,76%	14,97%	14,92%	14,09%
Kab. Majalengka	18,39%	18,81%	19,04%	21,15%	21,23%

Kabupaten / Kota	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kab. Purwakarta	28,67%	28,87%	29,24%	33,17%	30,54%
Kab. Subang	19,22%	19,59%	20,23%	19,34%	22,42%
Kab. Sukabumi	19,75%	22,48%	21,13%	21,32%	21,10%
Kab. Sumedang	18,71%	19,17%	21,05%	21,94%	22,30%
Kab. Tasikmalaya	8,60%	9,90%	14,01%	10,79%	10,52%
Kota Bandung	70,27%	61,56%	64,25%	75,55%	74,13%
Kota Bekasi	73,36%	72,04%	83,95%	79,61%	80,03%
Kota Bogor	69,79%	61,60%	73,50%	70,00%	82,18%
Kota Cirebon	48,26%	38,35%	44,37%	57,74%	57,75%
Kota Depok	73,51%	71,80%	89,76%	81,99%	85,90%
Kota Sukabumi	40,52%	43,99%	40,03%	43,40%	48,89%
Kota Tasikmalaya	18,49%	22,84%	29,38%	23,14%	27,30%
Kota Cimahi	38,77%	41,36%	38,47%	42,15%	43,73%
Kota Banjar	14,86%	18,65%	21,09%	21,69%	20,96%
Kab. Bandung Barat	23,94%	24,86%	26,07%	34,76%	29,77%
Kab. Pangandaran	8,95%	7,55%	15,70%	20,88%	22,24%
Rata-Rata	34,11%	33,79%	37,29%	37,34%	38,15%

Sumber: DJPK

Berdasarkan Tabel 1, terlihat bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah pada 27 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2019–2023 menunjukkan pola yang tidak merata. Terdapat disparitas yang cukup signifikan antara daerah dengan tingkat kemandirian fiskal tinggi dan daerah yang masih berada pada kategori rendah. Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 2023 tercatat adanya penurunan tingkat kemandirian di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta, dan Kabupaten Ciamis, yang mengalami penurunan rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat dan provinsi.

Tahun 2023, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Bogor menunjukkan peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah dibandingkan tahun 2022. Meskipun demikian, capaian tersebut masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan angka pada tahun 2021. Di sisi lain, Kabupaten Tasikmalaya tercatat memiliki tingkat kemandirian fiskal terendah di antara seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2023, dengan rasio sebesar 10,52%. Selain itu, beberapa daerah lainnya seperti Kabupaten Ciamis (10,93%), Kabupaten Garut (12,69%), dan Kabupaten Kuningan (14,09%) juga menunjukkan tingkat kemandirian keuangan yang tergolong sangat rendah, mengindikasikan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi.

Penurunan tingkat kemandirian keuangan daerah yang terjadi di sejumlah kabupaten/kota mencerminkan ketidakseimbangan dalam struktur pendapatan daerah. Kondisi ini ditandai dengan meningkatnya proporsi dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat maupun provinsi, yang tidak diimbangi oleh peningkatan signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila kontribusi PAD lebih rendah dibandingkan pendapatan transfer, maka rasio kemandirian fiskal otomatis menurun, yang menunjukkan tingginya ketergantungan daerah terhadap sumber pendanaan eksternal dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kemandirian keuangan daerah di sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat adalah besarnya alokasi dana transfer dari pemerintah pusat. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer ini mengindikasikan bahwa kapasitas fiskal daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan secara mandiri masih terbatas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya pencapaian kemandirian keuangan daerah belum sepenuhnya terwujud secara optimal (Marnas et al, 2016).

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat diukur melalui perbandingan antara jumlah PAD yang dianggarkan dengan realisasi PAD yang berhasil dikumpulkan dalam satu periode anggaran. Sebagai sumber pembiayaan yang berasal langsung dari potensi ekonomi lokal, PAD mencerminkan kemampuan riil suatu daerah dalam menggali sumber daya fiskalnya secara mandiri. Oleh karena itu, tingkat efektivitas PAD menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana perencanaan dan pengelolaan pendapatan daerah dilakukan secara optimal (Tjahjono & Oktavianti, 2016). Efektivitas

Pendapatan Asli Daerah diukur melalui rasio antara realisasi PAD yang diperoleh dengan jumlah target PAD yang telah ditetapkan dalam anggaran. Rasio ini mencerminkan tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mencapai sasaran pendapatan yang direncanakan dari sumber-sumber lokal (Marsudi et al., 2019).

Tingkat efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat menunjukkan tren penurunan dalam kurun waktu 2021 hingga 2023. Salah satu penyebab dari penurunan ini diduga berasal dari penetapan target PAD yang kurang realistis dan tidak selaras dengan potensi riil daerah. Di antara seluruh wilayah, Kabupaten Kuningan mencatat peningkatan efektivitas yang paling signifikan, sedangkan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Bandung Barat mengalami penurunan efektivitas yang cukup tajam dalam periode yang sama.

Pengelolaan belanja daerah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah yang memerlukan alokasi anggaran dalam jumlah berbeda. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, salah satu variabel yang digunakan dalam menentukan distribusi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah tingkat kebutuhan daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana secara lebih komprehensif (Nur Shafira Anynda, 2020). Tingkat efisiensi dalam pengelolaan belanja daerah dapat diukur melalui perbandingan antara total pendapatan daerah dan total belanja daerah. Rasio ini memberikan gambaran mengenai kemampuan pemerintah daerah dalam menyesuaikan pengeluaran dengan pendapatan yang diperoleh (Hakiki et al, 2023).

Pengelolaan belanja daerah menunjukkan adanya tren perbaikan dari tahun ke tahun, ditandai dengan pergeseran pola belanja sebagian besar daerah dari pendekatan yang cenderung agresif menuju arah yang lebih efisien dan terukur. Meskipun demikian, tidak semua daerah menunjukkan konsistensi dalam penerapan prinsip efisiensi anggaran. Beberapa wilayah, seperti Kota Cimahi dan Kota Depok, masih menghadapi tantangan dalam hal pengendalian anggaran serta memerlukan penguatan mekanisme evaluasi fiskal secara berkala untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian terdahulu diantaranya, Permatasari & Trisnaningsih (2022) menyatakan bahwa efektifitas pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan penelitian Riza & Zuripal (2023) menemukan bahwa pengaruh efektivitas pendapatan asli daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian Anynda (2020) dan Oktavia & Handayani (2021) menunjukan bahwa pengaruh efektivitas pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Namun penelitian Utomo (2015) dan Marnas et al, (2016) menemukan bahwa pengaruh efektifitas pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian daerah.

Kemudian penelitian Anynda (2020) menemukan bahwa pengaruh pengelolaan belanja daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan daerah. Sedangkan penelitian Oktavia & Handayani (2021) dan Ramadhan et al (2022) memperlihatkan bahwasannya pengelolaan belanja daerah berdampak negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian Frijunita et al. (2024) menunjukan bahwa pengaruh pengelolaan belanja daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan sekarang ini bertujuan menganalisis pengaruh efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2019-2023.

Pengembangan Hipotesis

Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Penelitian Anynda (2020) menyatakan bahwa efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencerminkan sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan merealisasikan pendapatan yang telah direncanakan, dengan mempertimbangkan potensi riil yang dimiliki daerah tersebut. Ukuran ini menunjukkan tingkat keberhasilan daerah dalam mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi capaian PAD, maka semakin besar pula kontribusinya terhadap peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah, karena pendapatan tersebut mencerminkan kemampuan pembiayaan yang bersumber dari potensi internal daerah tanpa bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

Oleh karena itu, penelitian Riza & Zuripal (2023) menyebutkan bahwa efektivitas Pendapatan Asli Daerah terbukti memiliki hubungan yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian

keuangan daerah. Hal ini didukung penelitian Permatasari & Trisnaningsih (2022) yang menemukan bahwa efektivitas PAD secara parsial memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah. Kinerja tersebut diukur menggunakan rasio kemandirian, yang merefleksikan kemampuan suatu daerah dalam membiayai kebutuhan fiskalnya secara mandiri tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
H_1: Efektivitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pengaruh Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pengelolaan belanja daerah merupakan proses pengaturan dan penggunaan anggaran belanja oleh pemerintah daerah yang dilakukan secara proporsional, tanpa melebihi total pendapatan yang tersedia. Penerapan prinsip efisiensi dan ketepatan dalam pengelolaan belanja tersebut berkontribusi langsung terhadap peningkatan kinerja keuangan daerah, terutama dalam menciptakan stabilitas fiskal dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pembangunan (Hakiki et al, 2023). Oleh karena itu, semakin baik pengelolaan belanja daerah, maka pemerintah daerah akan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih optimal dan berkualitas. Kondisi ini juga dapat berdampak pada meningkatnya tingkat kemandirian keuangan daerah.

Penelitian Oktavia & Handayani (2021) menyatakan bahwa pengelolaan belanja daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan temuan Frijunita et al. (2024) yang menyatakan bahwa efisiensi dalam pengelolaan belanja turut memberikan dampak positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.
H_2: Pengelolaan Belanja Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Pengaruh Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Pengelolaan Belanja Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Tingkat kemandirian keuangan daerah dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya efektivitas dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah serta efisiensi pengelolaan belanja daerah. Dalam hal ini, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik secara transparan dan akuntabel guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Ramadhan et al, 2022). Untuk membangun kepercayaan, kesejahteraan dan mencegah konflik kepentingan, Pada akhirnya, hal tersebut akan mendorong peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah.

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan merealisasikan PAD sesuai dengan rencana, yang kemudian diukur melalui perbandingan antara pendapatan yang ditargetkan dengan pendapatan yang berhasil dicapai (Oktavia & Handayani, 2021). Semakin tinggi jumlah Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh, maka semakin besar pula tingkat kemandirian keuangan daerah yang dapat dicapai secara optimal.

Pengelolaan belanja daerah digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah mampu mengalokasikan pendapatan yang diperoleh ke dalam belanja secara efektif. Dalam hal ini, prinsip yang dijadikan acuan adalah bahwa jumlah belanja pemerintah tidak melebihi total pendapatan daerah yang tersedia (Permatasari & Trisnaningsih, 2022). Semakin meningkat pengelolaan belanja daerah agar kemandirian keuangan daerah dapat tercapai dan terus meningkat.
H_3: Efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Pengelolaan Belanja Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dan asosiatif (Sugiyono, 2023) yang bertujuan untuk mengkaji hubungan kausal antar variabel. Objek penelitian mencakup seluruh Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat. Data yang digunakan diperoleh dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (https://djpk.kemenkeu.go.id/). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *nonprobability sampling* dengan pendekatan sensus atau *total sampling*, di mana seluruh populasi dijadikan sampel penelitian. Populasi dalam studi ini terdiri atas 27 entitas pemerintah daerah, yang meliputi 18 kabupaten dan 9 kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2019–2023.

Pengujian asumsi klasik dilakukan diantaramya: a) uji normalitas. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan alat Kolmogorov-smirnov (K-S). Data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikan atau nilai probabilitas Asymp Sig. (2-tailed) > 0,05. Sebaliknya apabila nilai signifikan atau probabilitas Asymp Sig. (2-tailed) < 0,05; maka data penelitian dinyatakan tidak berdistribusi normal; b) uji multikolonearitas. Uji Multikolonearitas dengan ketentuan bahwa nilai *tolerance* untuk semua variabel > 0,1 dan nilai VIF < 10; c) uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini melalui hasil Grafik *scatterplot*, apabila tidak ada pola yang jelas, seperti titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol (0) pada sumbu Y, maka tidak memiliki masalah heteroskedastisitas; dan d) uji autokorelasi. Uji autokorelasi berdasarakan nilai Durbin-Watson (DW). Berdasarkan perhitungan nilai pada tabel Durbin-Watson untuk taraf signifikan α = 5%, jumlah pengamatan = 135, dan jumlah variabel independen sebanyak 2 variabel, diperoleh nilai dU sebesar 1,7490 dan 4-dU sebesar 2,251. Maka diperoleh hasil uji Durbin-Watson dengan nilai dU (1,7490) < dW < 4-dU (2,251).

Uji t dilakukan dengan cara melakukan perbandingan antara t_{hitung} dengan t_{tabel}. Kriteria yang diambil yaitu jika $t_{hitung} > t_{tabel;}$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya secara parsial variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sedangkan uji F dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai F_{hitung} dengan F_{tabel}. Perhitungan nilai F-tabel menggunakan rumus (k; n–k), di mana k merupakan jumlah variabel independen dan n adalah jumlah pengamatan, diperoleh F-tabel sebesar 3,06. Apabila nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$; maka H_0 ditolak dan H_a diterima yang artinya terdapat pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Analisis koefisien determinasi. Nilai koefisien determinasi (R^2) berkisar antara nol dan satu. Jika nilai mendekati 1 (satu), maka semakin besar proporsi variasi dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sebaliknya, jika nilai R^2 yang rendah menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen masih terbatas (Ghozali, 2021).

HASIL

Tabel 2
Uji *Kolmogorov-smirnov* (K-S)

N			135
Normal Parameters[a,b]	Mean		0,0000000
	Std. Deviation		16,43566285
Most Extreme Differences	Absolute		0,072
	Positive		0,072
	Negative		-0,039
Test Statistic			0,072
Asymp. Sig. (2-tailed)[c]			0,083
Monte Carlo Sig. (2-tailed)[d]	Sig.		0,086
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0,079
		Upper Bound	0,093

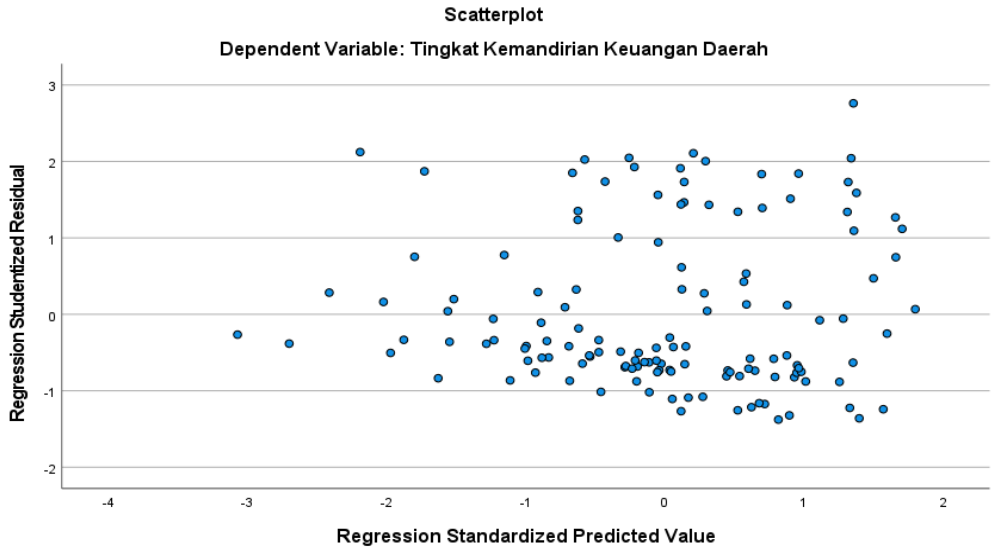
Sumber: data olahan

Tabel 2 menjelaskan bahwa hasil uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) menunjukkan nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,083 > α (0,05); maka dapat dikatakan bahwa data residual dalam penelitian ini terdistribusi secara normal, sehingga asumsi normalitas dapat dinyatakan terpenuhi. Sedangkan Tabel 3 diketahui bahwa nilai *tolerance* untuk variabel efektivitas pendapatan asli daerah (X1) dan pengelolaan belanja daerah (X2) masing-masing tercatat sebesar 0,998, sementara nilai VIF keduanya sebesar 1,002; karena nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat indikasi multikolinearitas di antara kedua variabel independen yang dianalisis dalam penelitian ini. Artinya, keduanya tidak memiliki hubungan yang terlalu kuat dan tetap layak untuk digunakan dalam model regresi.

Tabel 3
Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	0,998	1,002
	Pengelolaan Belanja Daerah	0,998	1,002

Sumber: data olahan



Gambar 1
Uji Heteroskedastisitas

Sumber: data olahan

Berdasarkan Gambar 1 dapat diketahui bahwa distribusi titik-titik data tampak acak dan tersebar di atas serta di bawah garis nol pada sumbu Y. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengindikasikan adanya gejala heteroskedastisitas. Sedangkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,769, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat indikasi autokorelasi dalam model regresi yang digunakan.

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.189[a]	0,036	0,021	23,28303	1,769

Sumber: data olahan

Tabel 5
Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-2,062	17,336		-0,119	0,906
	Efektivitas Pendapatan Asli Daerah	0,383	0,175	0,187	2,185	0,031
	Pengelolaan Belanja Daerah	0,001	0,003	0,018	0,212	0,832

Sumber: data olahan

Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda pada Tabel 5, maka dapat dibuatkan persamaan regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$

$Y = -2{,}062 + 0{,}383\ X_1 + 0{,}001\ X_2$

Hasil persamaan regresi linier berganda tersebut, maka masing-masing variabel dapat diinterpretasikan pengaruhnya sebagai berikut:

1. Nilai konstanta yang diperoleh sebesar -2,062 menunjukkan bahwa apabila variabel independen, yaitu efektivitas pendapatan asli daerah (X1) dan pengelolaan belanja daerah (X2), tidak memiliki nilai (atau bernilai nol), maka variabel dependen, yaitu tingkat kemandirian keuangan daerah (Y), diperkirakan berada pada angka negatif sebesar -2,062.
2. Koefisien regresi untuk variabel efektivitas pendapatan asli daerah (X1) sebesar 0,383 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada efektivitas PAD akan menyebabkan peningkatan sebesar 0,383 pada tingkat kemandirian keuangan daerah (Y). Nilai koefisien yang positif ini mengindikasikan adanya hubungan searah, di mana semakin tinggi efektivitas PAD, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerah.
3. Koefisien regresi untuk variabel pengelolaan belanja daerah (X2) sebesar 0,001 mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam pengelolaan belanja daerah akan mendorong peningkatan sebesar 0,001 pada tingkat kemandirian keuangan daerah (Y). Nilai koefisien yang positif mencerminkan hubungan yang searah, yakni semakin baik pengelolaan belanja daerah, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan daerah**.**

Tabel 5 juga dapat diketahui uji t dengan menghitung nilai t_{tabel} dengan rumus (α/2 ; n-k-1), dimana nilai n = jumlah pengamatan dan k = jumlah variabel independent, maka diperoleh nilai t_{tabel} adalah t_{tabel} = t (α/2 ; n-k-1) = t (0,05/2 ; 135-2-1) = 1,978. Berdasarkan hasil pengujian parsial dan nilai $t_{tabel,}$ maka hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut: hipotesis pertama (H1) dalam penelitian ini adalah variabel efektivitas pendapatan asli daerah (X1) memiliki nilai t-hitung 2,185 > t-tabel 1,978; artinya H0 ditolak dan Ha diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa efektivitas PAD (X1) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (Y). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin optimal suatu daerah dalam menghasilkan dan memanfaatkan pendapatan asli dari sumber-sumber lokalnya untuk membiayai kebutuhan pemerintahan, maka semakin tinggi pula tingkat kemandirian keuangan yang dapat dicapai. Kemandirian keuangan daerah mencerminkan kemampuan dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola keuangannya secara mandiri, tanpa bergantung secara dominan pada pemerintah pusat.

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola dan merealisasikan pendapatan asli daerah sesuai dengan target yang telah dirumuskan sebelumnya. Dengan kata lain, semakin besar capaian pendapatan asli daerah yang berhasil direalisasikan dibandingkan dengan targetnya, maka akan semakin meningkatkan tingkat kemandirian keuangan daerah yang bersangkutan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Permatasari & Trisnaningsih (2022) serta Oktavia & Handayani (2021), yang menunjukkan bahwa efektivitas pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat efektivitas pendapatan asli daerah, maka semakin besar pula tingkat kemandirian keuangan yang dapat dicapai oleh suatu daerah. Namun, temuan dalam penelitian ini tidak selaras dengan penelitian Riza & Zuripal (2023), yang menyimpulkan bahwa efektivitas pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Ketidaksesuaian ini disebabkan oleh fluktuasi efektivitas pendapatan asli daerah selama periode penelitian, serta ketergantungan pemerintah daerah yang masih tinggi terhadap dana dari pemerintah pusat. Akibatnya, peningkatan efektivitas PAD tidak cukup berkontribusi dalam mendorong kemandirian keuangan daerah**.**

Hipotesis kedua (H2) dalam penelitian ini adalah variabel pengelolaan belanja daerah (X2) menunjukkan nilai t-hitung 0,212 < t-tabel 1,978; artinya Ha ditolak dan H0 diterima, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel pengelolaan belanja daerah (X2) tidak memiliki pengaruh yang positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (Y). Berdasarkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa pengelolaan belanja daerah tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, artinya bahwa terjadinya penurunan pemerintah daerah dalam belanja daerah yang menyebabkan penurunan kualitas layanan publik sehingga menjadikan penurunan kemandirian keuangan daerah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Frijunita et al. (2024) yang menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, artinya pengelolaan belanja daerah tidak akan mendorong peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah, sebaliknya pengelolaan belanja daerah yang rendah tidak akan menurunkan tingkat kemandirian keuangan daerah. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Anynda (2020) yang menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, dimana tingginya pengelolaan belanja daerah akan berpengaruh pada peningkatan tingkat kemandirian keuangan daerah. Kondisi ini memotivasi pemerintah daerah dalam hal menggali potensi daerah sehingga pendapatan daerah meningkat.

Tabel 6
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2641,236	2	1320,618	2,436	.091[b]
	Residual	71557,143	132	542,100		
	Total	74198,379	134			

Sumber: data olahan

Mengacu pada hasil uji simultan Tabel 6 dan perhitungan nilai F-tabel menggunakan rumus (k; n–k), di mana k merupakan jumlah variabel independen dan n adalah jumlah pengamatan, diperoleh F-tabel sebesar 3,06. Nilai F-hitung sebesar 2,436 < F-tabel; artinya Ha ditolak dan H0 diterima, yang berarti bahwa variabel efektivitas Pendapatan Asli Daerah (X1) dan pengelolaan belanja daerah (X2) secara simultan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (Y). Meskipun hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa pengelolaan belanja daerah tidak memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah, namun penelitian ini tetap memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang berpotensi memengaruhi kemandirian fiskal daerah. Temuan ini juga mengindikasikan bahwa baik Efektivitas Pendapatan Asli Daerah maupun Pengelolaan Belanja Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat selama periode 2019–2023.

Tabel 7
Hasil Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.189[a]	0,036	0,021	23,28303

Sumber: Hasil *Output* SPSS 27 (data diolah 2025)

Berdasarkan Tabel 7 diperoleh nilai koefisien determinasi atau *R Square* (R_2) sebesar 0,036 atau 3,6%, hal ini menunjukkan bahwa variabel efektivitas Pendapatan Asli Daerah (X1) dan pengelolaan belanja daerah (X2) secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah (Y) sebesar 3,6%. Sementara itu, sisanya sebesar 96,4% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Temuan ini menunjukkan bahwa kontribusi kedua variabel independen tersebut terhadap kemandirian keuangan daerah relatif kecil, sehingga diperlukan eksplorasi lebih lanjut terhadap faktor-faktor lain yang kemungkinan memiliki pengaruh lebih dominan.

SIMPULAN

Hasil penelitian ini mengugkapkan bahwa secara simultan tidak terdapat pengaruh signifikan antara variabel efektivitas Pendapatan Asli Daerah dan Pengelolaan Belanja Daerah terhadap terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Namun, jika secara parsial hanya variabel Efektifitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023.

DAFTAR PUSTAKA

Anynda, Nur Shafira, 2020, Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah, dan Pengelolaan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Skripsi,* STIESIA Surabaya.

Frijunita, S., Gurendrawati, E., Utaminingtyas, T., 2024. Pengaruh PAD, Tax Effort, dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*. 5(2). 256-269

Ghozali, I., 2021. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 26 IBM" SPSS" Statistics*

Hakiki, D., Tumija, Agustina, I., 2023. Pengaruh Rasio Kemandirian Daerah dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau. JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik), 10(1), 56-78

Hendaris, R. B., Sastradipraja, U., 2024. Analysis of Factors Affecting Local Government Financial Performance. *DIJEFA: Dinansti International Journal of Economics, Finance & Accounting,* 5(5), 5399-5410

Marnas., Afrizal., Yuliusman., 2016. Pengaruh Efektifitas, Efisiensi dan Keserasian terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Unja*, 1(3), 69-79

Marsudi, J., Supradi, A., Susandra, F., 2019. Tingkat Kemandirian, Efisiensi, Efektivitas, dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah: Kajian Pada Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Akunida*, *5*(2), 32–46.

Oktavia, C., Handayani, N., 2021. Pengaruh PAD, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(3), 1-20

Permatasari, D. A., Trisnaningsih, S., 2022. Pengaruh Kemandirian, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Daerah terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, *22*(3), 1573-1582

Ramadhan, M., Kustiawan, M., Fitriana, F., 2022. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah, dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Syntax Transformation*, *3*(6), 832-846.

Riza, R., Zuripal., 2023. Pengaruh Tingkat Ketergantungan Daerah, Efektifitas PAD dan Tax Effort Terhadap Kemandirian Daerah pada Pemerintah Kota Bukittinggi. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)*, *9*(5), 1961–1973.

Sugiyono, 2023. *Metode Penelitian Kuantitatif.dan R&D.* Alfabeta.

Tjahjono, A., Oktavianti, R., 2016. Pengaruh Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi DIY. *Jurnal Kajian Bisnis*, 24(1), 25-34

Utomo, M. A. S., 2015. Analisis Penggunaan Ratio Kemandirian, Efektivitas, Efisiensi, Aktivitas dan Pertumbuhan sebagai Alternatif Pengukuran Kinerja Keuangan pada Pemda DKI Jakarta, JRAA, 2(3), 15-52

Widowati, N., Mulyana, D., Supriadi, A., 2024. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Nuansa : Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, *2*(3), 413–433.